

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA MODAL PADA KABUPATEN DAN KOTA PROPINSI SULAWESI UTARA

Oleh :
Justonly Lengkong
David P.E. Saerang
Stanly Alexander

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado
email : Punk_c07@yahoo.com

ABSTRAK

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan utama dari wilayah daerah itu sendiri. PAD diharapkan mampu menunjang Belanja Modal (BM), karena PAD yang meningkat diharapkan akan menambah pendapatan daerah dari pembangunan infrastruktur yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh PAD terhadap BM. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah PAD dan BM. Data penelitian berupa data kuantitatif dan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik di Sulawesi Utara. Penelitian ini menggunakan metode regresi sederhana yang dibantu oleh uji asumsi klasik. Hal ini menunjukkan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap BM. Hasil penelitian ini menunjukkan PAD ternyata belum mampu untuk menunjang Belanja Modal karena masih terlalu minim penerimaan daerah. Saran penelitian ini pemerintah diharapkan lebih memperhatikan dan mengembangkan lagi potensi dari wilayah Sulawesi Utara untuk dapat memaksimalkan pendapatan dari daerah.

Kata kunci: *pendapatan asli daerah dan belanja modal*

ABSTRACT

Regional Original Income is the main source of income of the local region itself. Regional Original Income is expected to be able to support Expense of Capital, because the Regional Original Income will increase is expected to add more revenue from existing infrastructure development. This research aimed to determine the effect of Regional Original Income for Expense of Capital. Variables used in this research Is the Regional Original Income and Expense of Capital. The research data in the form of quantitative data and a secondary data obtained from the Central Board of Statistic in North Sulawesi. In this research has used simple regression method assisted by classical assumption. This research showed that the Regional Original Income has no effect on Expense of Capital.

Keywords : *regional original income and expense of capital*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Otonomi daerah dalam UU No.32 thn 2004 menjelaskan tentang otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban dalam mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas, oleh karena itu otonomi yang berwawasan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat, perlu adanya pemahaman akan kebutuhan yang menjadi landasan berpikir pada bagian mengoperasikan otonomi tersebut sehingga mencapai sasaran untuk meningkatkan taraf dan kualitas hidup bermasyarakat melalui pembangunan daerah, dimana pembangunan daerah bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Mardiasmo, (2009:73) mengungkapkan bahwa dengan anggaran, pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya yang langka untuk menggerakkan pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambungan dan meningkatkan kualitas hidup bermasyarakat. Melalui pendapatan daerah juga, sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal didalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah sejak lama menjadi salah satu unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD). Digabungkannya anggaran dengan sumber-sumber pendapatan daerah maka pelaksanaan otonomi daerah bisa memaksimalkan akan kebutuhan dan meningkatkan akan kesejahteraan dari masyarakat daerah.

Pemberian otonomi daerah berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat rencana keuangannya sendiri dan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat berpengaruh pada kemajuan daerahnya. Peran pemerintah didalam pembangunan adalah sebagai katalisator dan fasilitator, karena pihak pemerintahlah yang lebih mengetahui sasaran tujuan pembangunan yang akan dicapai (Abdul dan Halim, 2004:237). Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam bentuk pelaksanaan kewenangan fiskal, setiap daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan didaerahnya melalui PAD. PAD merupakan hal yang penting untuk menentukan tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah secara nyata dan bertanggung jawab.

Upaya pemerintah dalam meningkatkan PAD tidak akan memberikan arti apabila tidak diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Dilain pihak, pemerintah daerah juga bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan keuangan yang berasal dari PAD tersebut, karena dana itu berasal dari masyarakat daerah setempat yang berhak untuk mendapatkan kembali dana tersebut dalam bentuk pembangunan yang dilaksanakan pada daerahnya. Karena itu dalam menjalani otonomi daerah yang sukses tergantung pada pimpinan-pimpinan daerah atau Pemerintah Daerah (Pemda) yang memotorisasi dengan baik demi kesejahteraan masyarakat dan peningkatan dalam hal ekonomi daerah tersebut.

Setiap daerah saat ini seolah-olah berlomba untuk meningkatkan pembangunan daerahnya sendiri, dan salah satu faktor pendukung kesejahteraan daerah adalah dengan tersedianya infrastruktur yang memadai. Peran PAD dalam meningkatkan kesejahteraan pada daerahnya sendiri adalah dengan meningkatkan investasi Belanja Modal (BM) pada pemerintah daerah sehingga kualitas layanan publik daerah semakin baik. Seiring meningkatnya investasi BM, pemerintah mendorong daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu kemitraan pada masyarakat demi mencapai kesejahteraan bagi masyarakat dengan membangun lapangan kerja yang baru dan mencapai tingkat PAD yang membaik atau meningkat.

Sembiring, (2009:13) mengungkapkan bahwa dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, BM sangat berkaitan dengan perencanaan keuangan jangka panjang, terutama pembiayaan untuk pemeliharaan aset tetap yang dihasilkan dari BM tersebut. Pemerintah harus beradaptasi untuk mengupayakan mutu pelayanan publik dan perbaikan berbagai sektor yang berpotensi agar mengubah struktur belanja semakin baik. Pemerintah juga harus memberikan proporsi BM yang lebih besar, pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan pemerintah daerah setempat dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik, pergeseran ini ditujukan untuk meningkatkan investasi BM. Peningkatan alokasi BM dalam bentuk aset tetap seperti infrastruktur memang sangat penting untuk meningkatkan produktivitas perekonomian, dan diharapkan akan bertambahnya pendapatan daerah.

Solikin, (2007:7) menyatakan bahwa semakin tinggi PAD maka pengeluaran pemerintah atas BM pun akan semakin tinggi, artinya temuan tersebut mengindikasikan bahwa besarnya PAD menjadi salah satu faktor penentu dalam menentukan BM. Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Sembiring, (2009) dan Solikin, (2007) tentang PAD yang berpengaruh terhadap BM.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Otonomi Daerah

Undang-Undang No. 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 5 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (www.sarjanaku.com, 2012). Suparmoko (2002:61) dalam www.sarjanaku.com (2012) mengartikan otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Salah satu sumber keuangan untuk penyelenggaraan pembangunan adalah pendapatan daerah. Pemerintah Daerah (Pemda) menyusun dan menetapkan (APBD) adalah sebagai alat utama untuk menjalankan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, dan merupakan rencana operasional keuangan daerah yang menggambarkan pengeluaran untuk kegiatan keseharian dan proyek pembangunan daerah dalam satu anggaran tertentu dan sumber penerimaan daerah dari hasil pajak daerah, retribusi pajak daerah, hasil perusahaan daerah dan hasil usaha lain yang sah untuk menutupi pengeluaran tersebut.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Halim (2009:62) menyatakan bahwa PAD adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mardiasmo (2009:132) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah.

PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan UU No. 33 tahun 2004, pasal 1 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa untuk mengumpulkan dana, guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. PAD bersumber dari :

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Belanja Modal (BM)

BM adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang nilai manfaatnya lebih dari setahun atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Belanja Modal dapat dikategorikan dalam 5 kategori yaitu :

1. Belanja Modal Tanah
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
5. Belanja Modal Fisik Lainnya

Penelitian Terdahulu

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

Nama/Tahun	Judul	Variabel	Hasil	Persamaan	Perbedaan
Solikin (2007)	Hubungan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal di Jawa Barat	Pendapatan Asli Daerah Dana Alokasi Umum Belanja Modal	Peneliti menggunakan korelasi <i>product moment pearson</i> menunjukkan bahwa semakin tinggi PAD atau DAU yang diterima, maka semakin tinggi pula belanja modal dikeluarkan. Selain itu, dengan menggunakan korelasi berganda maka PAD dan DAU memiliki hubungan positif yang kuat dengan belanja modal, berarti apabila PAD dan DAU meningkat maka belanja modal pun akan meningkat.	Peneliti sebelumnya melakukan penelitian tentang pengaruh PAD terhadap BM	Penelitian yang dilakukan bertempat pada kabupaten dan kota se Jawa Barat.
Putro (2010)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal	Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Asli Daerah Dana Alokasi Umum Belanja Modal	Hasil pengujian menunjukkan bahwa hanya DAU yang berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal sedangkan Pertumbuhan Ekonomi dan PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.	Peneliti sebelumnya melakukan penelitian terhadap pengaruh PAD pada BM	Peneliti melakukan penelitian pengaruh PAD terhadap pengalokasian anggaran BM di Propinsi Jawa Tengah

Sumber : Hasil Penelitian, 2013

Hubungan PAD dengan Belanja Modal

Mardiasmo, (2009:46) menyatakan bahwa selama ini PAD memiliki peran untuk pelaksanaan otonomi daerah guna mencapai tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah yang ingin meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Bermula dari keinginan untuk mewujudkan harapan tersebut, pemda melakukan berbagai cara dalam meningkatkan pelayanan publik, yang salah satunya dilakukan dengan belanja untuk kepentingan investasi yang direalisasikan melalui belanja modal (Solikin, 2007).

PAD sebenarnya merupakan andalan utama daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah dan pembiayaan pembangunan (Solikin, dikutip dalam Saragih, 2003:49). Tetapi penerimaan daerah dari unsur PAD saja belum mampu memenuhi kebutuhan daerah apalagi dengan penambahan wewenang daerah jelas akan membutuhkan dana tambahan bagi daerah (Solikin, dikutip dalam Saragih, 2003:49) sehingga daerah masih membutuhkan bantuan dana yang lain misalnya Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum dan faktor-faktor lain yang dapat memenuhi kebutuhan daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah metode Asosiasi. Jenis penelitian ini digunakan karena menurut (Sugiyono, 2003:33), penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan antar dua variabel atau lebih. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah PAD, PAD dalam hal ini adalah pendapatan daerah kabupaten dan kota yang bersumber dari hasil pajak daerah (HPD), hasil retribusi daerah (HRD), hasil perusahaan milik daerah serta hasil pengolahan kekayaan daerah (HPKD) dan lain-lain pendapatan yang sah (LPS). Variabel ini diukur dengan satuan Rupiah dan jugadiposisikan sebagai variabel independen dan variabel berikutnya adalah BM, BM dalam penelitian ini diartikan sebagai pengeluaran yang dilakukan dalam rangka menambah aset atau kekayaan daerah kabupaten dan kota yang masa manfaatnya lebih dari satu tahun anggaran, yang meliputi antara lain belanja untuk perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan dan juga belanja aset lainnya. Variabel ini diukur dengan satuan Rupiah dan juga diposisikan sebagai variabel dependen.

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data melalui bahan tertulis berupa buku-buku, data-data yang tersedia dan laporan-laporan yang relevan dengan objek penelitian (Dokumentasi). Adapun sampel dalam penelitian ini adalah 15 (seluruh) Kabupaten dan Kota di Propinsi Sulawesi Utara.

Metode Analisis

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan model regresi sederhana melalui persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + bX$$

Keterangan :

Y = Variabel dependen (nilai yang diprediksi)

X = Variabel independen

α = Konstanta

b = Koefisien Regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Tabel 2. Standar Deviasi

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std.Deviation
Pendapatan Asli Daerah	45	414.798	134.721.720	18.833.196,93	27.389.407,24
Belanja Modal	45	5.948.027	178.968.83	105.702.437,1	44.840.070,83
Valid N(listwise)	45				

Sumber : Data olah, 2013

Tabel 2 diatas menjelaskan tentang populasi sebanyak 45 data dan memperoleh data deskripsi sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah maksimum yang dimiliki oleh Propinsi Sulawesi Utara Rp.134.721.720 ribu, minimum Rp.424.798 ribu, dan rata-rata adalah Rp.18.833.916,93 ribu dengan standar deviasi Rp.27.389.407,24 ribu.
2. Belanja Modal maksimum yang dimiliki oleh Propinsi Sulawesi Utara adalah Rp.178.968.835 ribu, minimum Rp. 5.948.027 ribu dan rata-rata Rp. 105.702.437,18 ribu dengan standar deviasi Rp. 44.840.070,83

Tabel 3. Jumlah Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal menurut BPS tahun 2009-2011

Kabupaten dan Kota	Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Belanja Modal
Bolaang Mongondow	2009	79.870.10	138.045.907
Minahasa	2009	23.746.219	153.960.182
Kep. Sangihe Talaud	2009	33.076.684	161.273.533
Kep. Talaud	2009	5.152.506	78.506.962
Minahasa Selatan	2009	6.598.234	92.252.916
Minahasa Utara	2009	11.755.840	39.984.975
Bolmong Utara	2009	4.366.699	147.114.182
Sitaro	2009	8.477.802	126.143.361
Mitra	2009	2.705.000	161.808.201
Bolmong Selatan	2009	858.691	22.224.894
Bolmong Timur	2009	414.798	14.594.928
Manado	2009	72.404.996	60.648.654
Bitung	2009	16.822.774	96.790.462
Tomohon	2009	14.991.099	138.226.282
Kotamobagu	2009	6.142.246	131.972.797
Bolaang Mongondow	2010	98.494.245	5.948.027
Minahasa	2010	24.660.934	72.584.187
Kep. Sangihe Talaud	2010	23.768.306	122.420.734
Kep. Talaud	2010	7.704.136	79.881.090
Minahasa Selatan	2010	5.594.269	31.979.532
Minahasa Utara	2010	10.982.002	72.584.187
Bolmong Utara	2010	9.090.042	160.088.367
Sitaro	2010	12.027.487	148.049.899
Mitra	2010	4.430.162	79.524.066
Bolmong Selatan	2010	2.376.960	103.601.273
Bolmong Timur	2010	2.871.281	115.593.388
Manado	2010	90.828.484	97.490.453
Bitung	2010	18.763.528	113.573.131
Tomohon	2010	5.713.312	59.235.695
Kotamobagu	2010	8.957.374	149.644.788
Bolaang Mongondow	2011	5.535.929	83.860.407
Minahasa	2011	23.809.005	97.987.506
Kep. Sangihe Talaud	2011	28.506.001	95.738.052
Kep. Talaud	2011	8.735.988	62.651.657
Minahasa Selatan	2011	9.407.000	84.390.000
Minahasa Utara	2011	15.720.000	96.971.000
Bolmong Utara	2011	7.318.745	178.968.835
Sitaro	2011	13.703.246	177.258.164
Mitra	2011	4.956.000	140.499.000
Bolmong Selatan	2011	5.481.338	130.030.217
Bolmong Timur	2011	4.992.038	170.553.681
Manado	2011	134.721.720	165.582.485
Bitung	2011	25.394.063	103.257.610
Tomohon	2011	8.095.030	76.564.107
Kotamobagu	2011	9.354.639	116.549.899
Jumlah		847.493.862	4.756.609.673

Sumber : Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara, 2013

Jumlah keseluruhan PAD tahun 2009-2011 adalah Rp.847.493.862 dan BM dari tahun 2009-2011 adalah 4.756.609.673. Terlihat dari jumlah keseluruhan bahwa biaya pengeluaran BM jauh lebih meningkat dibandingkan PAD

Pembahasan

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji regresi sederhana dan hasilnya sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Regresi

Variabel	Beta	t hitung	Sig
Pendapatan Asli Daerah	-0,029	-0,175	0,862

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2013

Hasil pengujian Hipotesis menyatakan PAD tidak berpengaruh terhadap BM dengan nilai t sebesar -0,175 dengan signifikan 0,862. Nilai pengujian tersebut lebih besar dari 0,05. Dengan demikian maka ditujukan bahwa pada taraf signifikan 5% PAD secara signifikan tidak berpengaruh terhadap BM. Sehingga dapat dinyatakan bahwa jika nilai variabel PAD meningkat tidak akan berdampak pada meningkatnya nilai dari variabel BM. Hal ini berarti H_0 diterima dan H_a ditolak.

Persamaan Regresi ;

$$Y = \alpha + bX$$

$$Y = 10081,313 + -0,029X$$

$$Y = 10081,313 - 0,029X$$

Nilai b yang merupakan koefisien variabel PAD (X) pada persamaan tersebut adalah sebesar minus 0,029 dengan tingkat signifikan 0,862. Hal ini berarti variabel PAD (X) tidak berpengaruh signifikan pada level signifikan sebesar 5% terhadap variabel BM (Y). Sehingga dapat dinyatakan bahwa jika nilai variabel PAD (X) meningkat, maka tidak akan berdampak pada nilai dari variabel BM (Y).

PENUTUP

Kesimpulan

Hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap BM yang artinya PAD belum cukup mampu untuk menunjang BM karena terlalu kecil Pendapatan daerahnya. Karena juga untuk BM, pemerintah daerah masih mengharapkan bantuan/transfer dana dari pemerintah Pusat.

Saran

Penulis memberi saran yaitu pemerintah daerah lebih melihat lagi potensi daerahnya sendiri agar bisa di manfaatkan dan dapat menambah pendapatan daerah agar bisa dapat menunjang BM dalam hal ini pembangunan infrastruktur bangunan dengan harapan dapat meningkatnya pendapatan daerah dari penambahan infrastruktur tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul., Halim. 2004. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. UPP AMP YKPN. Jogjakarta.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2013. *Statistik Keuangan Pemerintahan Kabupaten/kota*. Jakarta
- Halim, Abdul. 2009. *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Revisi*. Salemba Empat. Jakarta.
- Mardiasmo, 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Jogjakarta.
- Putro, Nugroho Suratno. 2010. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang.
- Sembiring, Sri Hayati BR. 2009. Analisis Pengaruh Belanja modal dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Pemeliharaan dalam Realisasi Anggaran Pemerintahan Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatra Utara. *Skripsi*. Universitas Sumatra Utara. Medan.
- Solikin, Ikin. 2007. Hubungan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal di Jawa Barat. *Jurnal Eksklusif Vol.4 No.4*. Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Sliipi. Jakarta.
- Suparmoko. 2002. *Ekonomi Publik*. Andi. Jogjakarta.
- Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Bisnis*. Pusat Bahasa Depdiknas. Bandung.

- Yasin, Sanjaya. 2012. Pengertian Otonomi Daerah Makalah, Tujuan,. Prinsip, Undang-undang. Jakarta. <http://sarjanaku.com>. diunggah 11 juli 2013.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Jakarta.
- _____ UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta.